



Pemkot Siapkan Regulasi untuk Yatim Piatu Akibat Covid-19

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyiapkan sebuah regulasi untuk intervensi penanganan anak yatim, piatu, maupun yatim piatu akibat Covid-19. Hal ini untuk memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan, serta pengaman sosial.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogya, Edy Muhammad, menandakan, sejauh ini terdapat 248 anak yang kehilangan orang tuanya akibat paparan corona. Dari jumlah itu, 21 di antaranya kini berstatus yatim piatu.

"Untuk sementara kita prioritaskan yang yatim piatu dulu. Tapi, semuanya nanti akan diintervensi juga, setelah kita melakukan verifikasi, ya," tandas Edi, Senin (20/9). Keputusan untuk memprioritaskan yatim piatu pun bukan tanpa alasan. Menurutnya, di antara 21 anak, terdapat satu anak yang terguncang kejiwaannya. Alhasil, dirinya harus mendapat pendampingan, untuk pemulihan kondisi.

"Ada satu anak yang syok, belum bisa menerima keadaan. Namanya juga anak-anak, dan ditinggal orang tuanya, dua-duanya. Jadi, butuh pendampingan psikolog," ujarnya.

Satu di antara langkah intervensi tersebut adalah, dengan mempersiapkan re-

gulasi baru, agar kebijakan yang diambil Pemkot Yogyakarta pun semakin terstruktur. Dalam proses pembuatan payung hukum ini, pihaknya juga melibatkan beberapa instansi lain yang mempunyai kewenangan.

"Sehingga intervensi yang dilakukan Pemkot ini tepat, dan tidak menyalahi aturan. Sudah dikoordinir lewat Bagian Kesra, tentang kesiapan regulasi ini, supaya kita dapat melakukan intervensi secara langsung," katanya.

"Contoh, anak itu bukan penerima KMS. Tapi, karena orang tuanya meninggal, kan jadi butuh (bantuan) ya. Makanya, di regulasi itu harus dibunyikan, disebutkan skemanya nanti bagaimana, agar tertangani dengan baik," lanjut Edi.

Dalam regulasi itu, jelasnya, salah satu poinnya nanti akan mengatur tentang kebutuhan hak pola asuh anak. Sehingga, jika-lau anak membutuhkan pengasuhan alternatif, Pemkot dapat mewadahnya. Karena itu, pihaknya menggandeng organisasi kemasyarakatan (Ormas), maupun LSM.

"Dari Ormas misalnya Muhammadiyah, mereka kan punya beberapa panti asuhan, lalu beberapa LSM yang bermitra dengan kami juga. Jadi, kalau ada anak yang butuh itu, Pemkot mencari yang terbaik," katanya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005